

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU
DALAM KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

PINGGIR HARY PURNOMO

C100130203

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU
DALAM KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

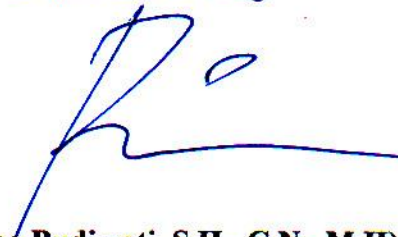
Oleh:

PINGGIR HARY PURNOMO

C100130203

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU
DALAM KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)**

Oleh:

PINGGIR HARY PURNOMO

C100130203

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum




Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 8 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



Pinggir Hary Purnomo
C100130203

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL BAKU
DALAM KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Surakarta)**

Abstrak

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan maupun barang-barang yang ditiptkan di tempat parkir tersebut. Kebanyakan petugas parkir dan pengelola jasa parkir tidak mau disalahkan jika terjadi kehilangan barang konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, *“Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/ atau kendaraan”*. Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha atau pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 18 UUPK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keabsahan klausula baku sebagai suatu perjanjian ditinjau dari syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas hukum perjanjian dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan UUPK. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis dengan menggunakan logika deduktif.

Kata Kunci: *klausula baku, pengelola parkir, perjanjian karcis parkir, UUPK*

Abstract

One of the important things in the management of parking is about the problem of protection for consumers of parking service users about the security of vehicles and goods deposited in the parking area. Most parking attendants and parking service managers are not to blame in the event of loss of consumer goods. The manager of the parking service always uses the reason that it is in accordance with the agreement or binding clause between the manager and the consumer that has been stated in the parking ticket, *“The parking Manager is not responsible for the loss of goods or vehicle.”* Any binding clauses which have been made between a business actor or a parking service manager are prohibited as in Article 18 of the Consumer Protection Law. The purpose of this study is to explain the validity of the standard clause as an agreement in the terms of the legal provisions of Article 1320 of the Civil Code Law and the principle of contract law and to describe the legal protection for parking service users against the use of the standard clause in the parking ticket at the Ministry Surakarta City based on the Consumer Protection Law. In this study the authors use empirical legal approach that is the research used to solve problems by conducting primary data research in the field. Type of research used by the author in this research is descriptive research with document study method and field method which analyzed by the deductive logical analysis.

Keywords: *binding clause, parking manager, parking ticket agreement, UUPK*

1. PENDAHULUAN

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan maupun barang-barang yang ditiptkan di tempat parkir tersebut.¹

Selama ini, pengelolaan parkir bukan tanpa masalah, seringkali terjadi kehilangan barang atau kendaraan di area parkir menyebabkan maraknya terjadi perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Kebanyakan petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan konsumen. Bukan saja petugas parkir, pengelola jasa parkir juga tidak ingin ambil resiko jika terjadi kehilangan barang pada konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, "*Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan/ atau kendaraan*", dan dengan berbagai macam kalimat yang mengandung makna yang sama.

Pencantuman klausula yang telah tersebut di atas merupakan salah satu bentuk dari klausula baku yang berarti bahwa, "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."² Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha dalam hal ini adalah pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Larangan dan persyaratan tentang pencantuman klausula baku merupakan salah satu wujud keseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

¹ Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir," *Perspektif*, Volume XX, Nomor 1 (Januari, 2015), hlm. 41-42

² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kemudian, ketentuan ini merupakan upaya dalam mencegah munculnya berbagai tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum.³

Dalam praktik penggunaan klausula baku dalam karcis parkir dalam hal adanya kehilangan barang atau kendaraan itu sendiri di lokasi parkir maka akan menjadi tanggung jawab siapa, menilik kenyataan bahwa pengelola maupun penjaga parkir menolak bertanggungjawab dan berlindung pada klausula baku yang telah tertera dalam karcis parkir tersebut. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika ada kehilangan barang di lokasi parkir, pihak pengelola harus tetap bertanggung jawab jika ada kendaraan yang hilang di lokasi parkir berdasarkan wanprestasi jika dianggap terpenuhinya asas konsensualisme pada saat kendaraan diparkir namun jika dianggap belum terdapat kesepakatan maka tanggung jawab tersebut dapat berasal akibat perbuatan melawan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (a) Bagaimana keabsahan klausula baku sebagai suatu perjanjian ditinjau dari syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata dan asas-asas hukum perjanjian? (b) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan atau lokasi penelitian. Jenis

³ Moch. Choirul Rizal, "Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3, Nomor 2 (Oktober, 2013), hlm. 302

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif⁴. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.⁶ Selain itu juga dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁷

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Klausula Baku Sebagai Suatu Perjanjian Ditinjau dari Syarat-Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai klausula baku yang tercantum dalam perjanjian parkir di dalam karcis parkir adalah sebagai berikut. Pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan modern di Surakarta masih tumbuh subur. Padahal, menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK, pencantuman klausula baku termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan pidana

⁴Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10

⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

⁶Ari Hermawan dan Murti Pramuwardhani Dewi, "Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hal. 62

⁷Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Secara teoritis, unsur pelanggaran hukum penerapan klausula baku dalam dimasukkan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum apabila dalam penerapan klausula baku tersebut di dalam karcis parkir kemudian menimbulkan kehilangan barang konsumen yang menyebabkan kerugian konsumen itu sendiri. Apabila di dalam praktek bisnis ada pelaku yang menggunakan klausula baku yang masuk kategori terlarang sebagaimana hal itu telah ditetapkan oleh pasal 18 ayat 1 UUPK maka tindakan pelaku bisnis tersebut dapat masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 B.W. Dari pasal 1365 B.w. tersebut, seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang . Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum).⁸

Salah satu syarat sah perjanjian yang pertama adalah adanya *kesepakatan*. Merujuk konsep perikatan di BW, apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maka akibatnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Perjanjian baku adalah membuat keseragaman ukuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Perjanjian baku ini tentu telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan telah ditetapkan secara sepihak isinya.

Selain melanggar syarat sah kesepakatan, perjanjian yang memuat klausula baku juga melanggar asas konsensualisme dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, yang menyebutkan bahwa syarat sah sebuah perjanjian adalah harus terdapat kesepakatan di antara dua pihak.

Selain itu perjanjian baku juga melanggar asas kebebasan berkontrak. Dalam hal pihak konsumen tidak adanya kebebasan dalam

⁸ Taufik Yahya, Dwi, dan Firya, "Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian_Jasa Perparkiran di Kota Jambi," *Majalah Hukum Forum Akademika*, hlm. 35

membuat perjanjian dan hanya menerima secara sepihak, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berkaitan dengan hal ini maka, menurut salah satu pegawai Dinas Perhubungan Kota Surakarta, membenarkan hal ini, bahwa adanya pencantuman klausula baku di karcis parkir merupakan suatu hal yang dilarang dalam praktek perparkiran sehari-hari karena melanggar UU Konsumen sehingga perjanjian yang dibuat secara sepihak menjadi batal demi hukum.⁹ Dari uraian yang telah dinyatakan di atas, maka pelanggaran terhadap klausula baku sebagaimana ditetapkan oleh ayat 1 dan ayat 2 pasal 18 UUPK maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Layanan Parkir terhadap Penggunaan Klausula Baku dalam Karcis Parkir di Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan perparkiran di wilayah Kota Surakarta, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Mengenai penyelenggaraan parkir, tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan. Tempat parkir terdiri dari : (a) tempat parkir tepi Jalan umum; (b) tempat khusus parkir

Tempat parkir tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tempat khusus parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan.¹⁰

Selanjutnya mengenai pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga

⁹ Dewa, Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada tanggal 1 Desember 2017

¹⁰ Slide Profil UPTD Parkir, *Manajemen Penyelenggaraan Parkir di Kota Surakarta*, Surakarta, (November, 2015)

melalui *pelelangan dan penunjukan*. Dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan *kartu tanda anggota*. Potensi pendapatan parkir berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh *Pemerintah Daerah, pengelola parkir dan/atau akademisi*. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir.¹¹

Potensi perparkiran merupakan salah satu bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan selamat, memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta, memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Surakarta pengguna jasa parker, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir atas pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang diterapkan di Kota Surakarta, maka dalam hal terjadi kehilangan barang konsumen maka hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir.

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.¹² Perjanjian penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

Menurut bunyi pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang

¹¹ *Ibid.*

¹² David M.L Tobing, 2007, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: Timpani Agung, hlm. 17

lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹³ Pasal 1706 KUHPdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri.¹⁴

Sedangkan lebih lanjut dalam pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Sehingga apabila pelaku usaha akibat produk yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut mengalami kerusakan, pencemaran, ataupun kerugian pada konsumen, mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi atau dengan pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam hal ini timbul ketidakadilan dan berpotensi merugikan konsumen, maka dengan kehadiran UUPK potensi terhadap ketidakadilan yang dialami oleh konsumen dapat diminimalisir.

Mengenai peran Dishub Kota Surakarta dalam menanggapi permasalahan perparkiran di Kota Solo, pihak Dishub menanggapi bahwa Dinas Perhubungan berperan sebagai regulator parkir di Kota Solo, yang juga dikelola oleh pihak ketiga atau pengelola parkir. Dimana diterapkan sistem bagi hasil pendapatan parkir antara pemerintah, pengelola, dan petugas parkir, dimana pemerintah mendapatkan 40%, pengelola parkir mendapatkan 20%, dan petugas parkir mendapatkan 25%.¹⁵

Mengenai kendala yang dihadapi beranekara permasalahan berkaitan dengan perparkiran di antaranya potensi lokasi parkir yang

¹³ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dewa, Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada tanggal 1 Desember 2017

belum berizin, kebocoran pendapatan. Mengenai pencantuman klausula baku di karcis parkir jika terjadi kehilangan atau kerusakan konsumen, Dishub berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak pengelola, Dinas Perhubungan berpendapat bahwa selama masyarakat yang parkir yang mendapatkan karcis, dia mempunyai bukti bahwa dia parkir disitu dia bisa menuntut kehilangan, soalnya kehilangan kendaraan atau kerusakan barang konsumen yang diakibatkan pengelola, atau karena dicuri merupakan tanggung jawab pengelola.

Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatur perparkiran di kawasan Solo, bahwa mereka melakukan dua bentuk patroli, yakni patroli harian di kawasan solo dan patroli gabungan dengan instansi lain misal dengan Pemprov atau polisi yang dilakukan seminggu sekali, dalam melakukan pengawasan tarif, menertibkan parkir-parkir liar yang digembok atau dikunci. Mengenai pendapat Dinas Perhubungan berkaitan dengan klausula baku yang ada di karcis parkir maka biasanya masih kerap terjadi tempat-tempat khusus parkir, kami suruh melepas, sebab hal tersebut merupakan pelanggaran aturan dan pelanggaran norma yang jelas-jelas dilarang oleh perda.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka konsumen dalam hal ini diberikan perlindungan sehingga tidak berada dalam posisi yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga diatur dalam Perda No. 1 tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Surakarta, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kerugian atau kehilangan barang maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola parkir, demikian juga dalam hal pencantuman klausula baku dalam karcis parkir di tempat-tempat parkir khusus seperti Mall, maka perlu ada pelaporan kepada

¹⁶ *Ibid.*

Dishub terkait agar klausula baku tersebut dihilangkan dari karcis parkir sehingga tidak merugikan konsumen itu sendiri.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. Keabsahan klausula baku sebagai suatu perjanjian ditinjau dari syarat-syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota dan asas-asas hukum perjanjian. Dalam hubungannya dengan klausula baku yang tercantum dalam karcis parkir di daerah Surakarta, berdasarkan hasil penelitian penulis masih banyak dijumpai karcis parkir di pusat-pusat perbelanjaan yang masih mencantumkan klausula baku. Secara teoritis, unsur pelanggaran hukum penerapan klausula baku dalam dimasukkan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum. Merujuk konsep perikatan di BW, apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maka akibatnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Perjanjian baku adalah membuat keseragaman ukuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Perjanjian baku ini tentu telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan telah ditetapkan secara sepihak isinya. Selain itu perjanjian baku juga melanggar asas kebebasan berkontrak. Dari uraian yang telah dinyatakan di atas, maka pelanggaran terhadap klausula baku sebagaimana ditetapkan oleh ayat 1 dan ayat 2 pasal 18 UUPK maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kedua. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir di Dinas Perhubungan Kota Surakarta berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir atas pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang diterapkan di Kota Surakarta, maka dalam hal terjadi kehilangan barang konsumen maka hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir. Dalam hal ini, mengenai pencantuman klausula baku di karcis parkir jika terjadi kehilangan atau kerusakan

konsumen, Dishub berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak pengelola, Dinas Perhubungan berpendapat bahwa selama masyarakat yang parkir yang mendapatkan karcis, dia mempunyai bukti bahwa dia parkir dia bisa menuntut kehilangan, sebab kehilangan kendaraan atau kerusakan barang konsumen yang diakibatkan pengelola, atau karena dicuri merupakan tanggung jawab pengelola. Berdasarkan uraian tersebut, maka konsumen dalam hal ini diberikan perlindungan sehingga tidak berada dalam posisi yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga diatur dalam Perda No. 1 tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Surakarta, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kerugian atau kehilangan barang maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola parkir, demikian juga dalam hal pencantuman klausula baku dalam karcis parkir di tempat-tempat parkir khusus seperti Mall, maka perlu ada pelaporan kepada Dishub terkait agar klausula baku tersebut dihilangkan dari karcis parkir sehingga tidak merugikan konsumen itu sendiri.

4.2 Saran

Pertama. Berkaitan dengan larangan pencantuman klausula baku dalam karcis parkir maupun dalam perjanjian-perjanjian baku lainnya, maka sebaiknya pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, terutama UU perlindungan konsumen yang jelas melarang penggunaan klausula baku, sehingga posisi antara konsumen dengan pelaku usaha berada pada posisi yang sejajar. Dan apabila masih ditemukan pencantuman klausula baku dalam karcis parkir oleh pengelola parkir, sebaiknya Dinas perhubungan memberikan sanksi yang tegas berupa sanksi administrasi dan pencabutan izin dari pengelola parkir tersebut.

Kedua. Mengenai perlindungan hukum bagi konsumen akibat pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang masih ditemukan

di beberapa pusat perparkiran seperti pusat perbelanjaan di wilayah Surakarta harus lebih ditingkatkan. Dalam hal ini, pihak pengelola parkir sebaiknya diberikan himbauan yang lebih agar tidak mencantumkan klausula baku pada karcis parkir. Dan sebaiknya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta terkait akan hal ini harus lebih ditingkatkan.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Slide Profil UPTD Parkir, *Manajemen Penyelenggaraan Parkir di Kota Surakarta, Surakarta*, (November, 2015)
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tobing, David M.L. 2007. *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpani Agung

Jurnal/Karya Ilmiah

- Basri. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir." *Jurnal Perspektif*, Volume XX, Nomor 1 (Januari, 2015)

Rizal, M. Choirul. 2013. "Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3, Nomor 2 (Oktober, 2013)

Taufik Yahya, Dwi Suryahartati, dan Firy Oktaviarni. "Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jasa Perparkiran di Kota Jambi." *Majalah Hukum Forum Akademika*. Volume 25, Nomor 1, (Maret, 2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Wawancara Pribadi

Dewa, Wawancara Pribadi Penulis dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada tanggal 1 Desember 2017